

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM HOME INDUSTRY UNGGULAN DI KOTA PALOPO

Ulfa

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: ulfa@iainpalopo.ac.id

Dhela Auliya Kusumayani

Administrasi Negara, Universitas Andi Djemma

Email : dhelaauliya@gmail.com

Rizka Amelia Armin

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email : rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study aims to describe the policy evaluation of the Featured Home Industry program in Palopo City by looking at the program policy evaluation indicators, namely technical feasibility, economic and financial opportunities, political support capacity, and organizational carrying capacity. The type of research used is descriptive qualitative research type intended to reveal the problem to be investigated by describing the subject and object of research based on existing facts about the Khilan Industry program. Data obtained through observation, interviews, and documentation of a number of informants. The results showed that initially the khilan program could improve the economic level of the community, but the subsequent development of the achievement of the results was not optimal because of the 50 khilan groups that were previously members of the khilan group, now only 3 groups are still actively producing, selling raw materials for making khilan products in the form of zero snacks. purchased from the khilan group at low prices, while the manufacturing process takes days, causing bottlenecks in the production of raw materials.

Keywords: Evaluation, Program Policy, Community Empowerment, Khilan Program.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi kebijakan program *Home Industry* Unggulan di Kota Palopo dengan melihat indikator evaluasi kebijakan program yaitu kelayakan teknis, peluang ekonomi dan finansial, daya dukung politis, dan daya dukung organisasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap masalah yang akan diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai program Industri Khilan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Hasil penelitian menunjukkan awalnya program khilan dapat meningkatkan taraf

ekonomi masyarakat, namun perkembangan selanjutnya pencapaian hasil kurang maksimal dikarenakan dari 50 kelompok khilan yang dulunya tergabung di kelompok khilan kini hanya tersisa 3 kelompok saja yang masih aktif memproduksi, penjualan bahan baku pembuatan produk khilan berupa snack zero dari kelompok khilan dibeli dengan harga murah sedangkan proses pembuatannya membutuhkan waktu sehari-hari, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan produksi bahan baku.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan Program, Pemberdayaan Masyarakat, Program Khilan.

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jelas mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu daerah, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, kenyataannya masyarakat marjinal yang sulit melakukan penyesuaian adaptasi yang pada akhirnya masyarakat kecil yang merasakan kebijakan tersebut, bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan problem kemiskinan yang krusial. Oleh karenanya penanganan masalah pemerataan pembangunan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial, termasuk menjaga kearifan lokal, dan gotong royong.¹

Tujuan dunia usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²

Tiga tugas utama yang mesti dilakukan oleh sebuah negara bangsa (*nation-state*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan wirausaha (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlakukan untuk membiayai kegiatan pembangunan.³

Strategi pembangunan yang dikembangkan selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan trickle down effect kepada lapisan ekonomi di bawahnya. Model seperti ini mendasarkan diri pada pembangunan industri

¹ Huda, Miftachul. (2009), *Pekerjaan sosial & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Putaka Pelajar.

² UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³ Michael, Blanchard, Ken. *et. al.* 2004. *Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit*. Batam Centre: Interaksara.

secara besar-besaran. Permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya mekanisme trickle down effects, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi kapital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata. Namun demikian yang terjadi justru sebaliknya, yaitu tetesan dorongan atau pemerataan ke bawah tidak terjadi, mungkin sejak awal aturan dari pemerintah tidak jelas dan juga egoistik konglomerasi akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan pembagian pendapatan dari pembangunan itu sendiri.⁴

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : *Produktifitas*, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, *Ekuitas*, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, *Kesinambungan*, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, *Pemberdayaan*, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁵

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan yakni bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*.⁶

Sejak lama Pemerintah daerah Kota Palopo telah menetapkan upaya pengetasan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program prioritas daerah. Sejalan dengan implementasi Visi dan Misi Pemerintah Kota Palopo, yang tertuang dalam kerangka konsep pembangunan melalui penajaman 23 Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/D) maupun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo mengeluarkan Program-program dalam kebijakan pemerintahannya yaitu salah satunya adalah Program Keluarga Harapan dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Unggulan *HomeIndustry* (Khilan) Kota Palopo.

Kelurahan Binturu merupakan salah satu Kelurahan yang terdata dalam program khilan tersebut selain dari 3 kelurahan yang juga ikut tergabung dalam program pemerintah tersebut. Diawal program ini berjalan sangat baik dan

⁴ Nano Prawoto. 2009. Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Hal: 57

⁵ Kharisma Bayu, 2013. Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Manajemen teori dan terapan. Hal 95

⁶ Michael, Blanchard, Ken. *et. al.* 2004. *Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit*. Batam Centre: Interaksara.

memberikan penghasilan bagi para ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok khilan untuk membantu prekonomian keluarga.

Akan tetapi semakin lama program ini berjalan tidak seperti apa yang menjadi tujuan sebelumnya. Hasil observasi di lapangan menunjukkan: pendapatan masyarakat kelompok khilan tersebut tidak sesuai atau tidak seperti pendapatan sebelumnya, adanya kemacetan produksi yang terjadi selama kurang lebih 10 bulan, banyak kelompok khilan yang sudah tidak aktif lagi dalam program, dan adanya keterbatasan produksi bagi masyarakat kelompok khilan.

Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan UP3D terkait evaluasi program kebijakan pengentasan kemiskinan di antaranya monitoring dan evaluasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar minyak (PKPS BBM) tahun 2003 dan 2005. Program PKPS BBM berasal dari pemerintah pusat. Beberapa kesimpulan dari monitoring dan evaluasi program tersebut adalah ragam program cukup banyak sehingga efektivitas program masih belum optimal. Karena program bersifat top-down, sehingga sebagian besar sasaran program (keluarga miskin) menganggap program tersebut hibah dan tidak perlu dipertanggungjawabkan.⁷

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu anggota kelompok yang berperan aktif sebagai pengarah atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).⁸

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM *HOME INDUSTRY* UNGGULAN DI KOTA PALOPO

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi, dan dampaknya.⁹ Dari sisi teknik pengukurannya, evaluasi kebijakan merupakan cara untuk menilai program pemerintah mulai dari teknik yang bersifat *impressionistis* (kesan observatif) sampai dengan teknik yang ilmiah dan sistematis dengan segala macam pedoman. Sementara dari sudut metode analisisnya yaitu bagaimana menggunakan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menunjukkan hasil akhir

⁷ Sutikno,dkk. 2010. pemilihan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sistem. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 11,Nomor 1. Hal:138

⁸ Miles, Mathew. B, A.Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. . Terjemahan Tjetjep Rohidi: UI-Press.

⁹ James Anderson. 1978. Public policy making.New York:Holt Rinehart and Winston.

(kesimpulan) dari kegiatan menilai program pemerintah tersebut, apakah program efektif atau tidak, memberikan dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya.¹⁰

Program Khiliran yang merupakan salah satu program unggulan prioritas yang digagas oleh Pemerintah Kota Palopo, diharapkan dapat memberikan solusi dalam membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan yang cukup tinggi. Program Khiliran bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kemandirian dalam beberapa hal yaitu membuka lapangan pekerjaan, dengan pemberdayaan kelompok yang di bentuk sesuai dengan potensi komoditi, lebih mudah untuk berinteraksi, karena dengan kelompok ini mudah mengakses modal, dan saling memberi, maupun pembinaan untuk lebih kuat dan mandiri, dan diharapkan mampu menampung, menyiapkan dan mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan. yang pada akhirnya dapat memberikan solusi positif, nilai tambah (*Value added*) membantu memulihkan kondisi masyarakat dari kondisi yang kurang beruntung menjadi suatu masyarakat yang lebih sejahtera.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena selain melibatkan individu yang terlibat dalam proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Beberapa dimensi pokok dari evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian yakni¹¹:

1. Kelayakan teknis;
2. Peluang ekonomi dan finansial;
3. Daya dukung politis;
4. Daya dukung Organisasi.

Evaluasi kebijakan dimaksudkan karena tidak semua program kebijakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, dalam kenyataannya dilapangan seringkali program kebijakan gagal meraih maksud dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Kelayakan teknis

Kelayakan teknis terkait penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diprediksi pencapaian tujuannya. Hal ini dapat dikaji melalui evaluasi pada tahap perencanaan¹².

a. Evaluasi Tahap Perencanaan

Pemerintah Kota Palopo mengeluarkan program-program dalam kebijakan pemerintahannya yaitu salah satunya adalah program keluarga harapan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program unggulan *homeindustry* (Khiliran) Kota Palopo. Adapun program ini awalnya dibawah langsung oleh

¹⁰ Mulyono Yalia. 2013. evaluasi kebijakan program *mobile* pusat layanan internet kecamatan (mplik). Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol.16,No.2. Hal:207.

¹¹ Patton, Carl V and Sawicki, David.S. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.

¹² Mulyono Yalia. 2013. evaluasi kebijakan program *mobile* pusat layanan internet kecamatan (mplik). Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol.16,No.2. Hal:210.

Dinas Koperindag namun pada tahun 2016 Dinas Koperindag terbagi menjadi 3 dinas yaitu Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Kemudian diambil alih oleh Dinas Perindustrian namun tetap ada koordinasi antara Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan beberapa lembaga-lembaga pemerintah kota lainnya. Khilan termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Khilan adalah kegiatan *home industry* atau rumah usaha produk atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Dimana tahap awal dari program khilan adalah menghimpun para pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian diverifikasi terkait layak tidaknya ikut menjadi peserta khilan.

Kelurahan Binturu merupakan salah satu Kelurahan yang terdata dalam program khilan tersebut selain dari 3 kelurahan yang juga ikut bergabung dalam program pemerintah tersebut. Diawal program ini berjalan sangat baik dan memeberikan penghasilan bagi para ibu rumah tangga yang bergabung dalam kelompok khilan untuk membantu prekonomian keluarga.

2. Peluang Ekonomi Dan Finansial

Peluang ekonomi dan finansial mencakup biaya program dan keuntungan yang dihasilkan. Program yang efisien adalah program yang mampu memberikan hasil atau keuntungan yang memadai dilihat dari segi biaya dan keuntungan dari program tersebut.¹³

Anggaran yang dikelola perusahaan daerah untuk khilan bersumber dari dana yang disediakan pemerintah melalui bank BPD sebesar 3,5 milyar sebagai modal awal. Hasil penjualan yang diperoleh tidak menentu terkadang banyak namun terkadang juga kurang, namun jika diperkirakan maka pendapatan penjualan sekitar 1,2 M kemudian dipakai kembali untuk operasional. Pemberdayaan ke masyarakat tetap jalan walaupun sempat tidak jalan disebabkan bahan baku yang diterima perusda dari beberapa kelompok KHILAN tidak sesuai

¹³ Mulyono Yalia. 2013. evaluasi kebijakan program *mobile* pusat layanan internet kecamatan (mplik). Jurnal Penelitian Komunikasi. Hal:209.

dengan standar sehingga berdampak kepada kualitas produk dan bisa mempengaruhi omset di perusda.

Tahap awal dari khilan adalah menghimpun para pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian diverifikasi terkait layak tidaknya ikut menjadi peserta khilan. Hasilnya, 200 orang lolos verifikasi, dalam 1 kelompok terdiri atas sepuluh orang, setelah itu setiap kelompok mengikuti tahap berikutnya yaitu pemerintah memberikan pelatihan selama 10 hari di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG-Melindo).

Tabel 1. Jumlah Peserta Khilan Di Kecamatan yang Tergabung.

NO	Kecamatan	Jumlah
1.	Wara	50
2.	Wara Selatan	50
3.	Wara utara	50
4.	Wara Barat	50

Sumber: Hasil Observasi, Tahun 2018

Tiap kelompok khilan hanya mensuplai bahan baku produk ke perusda kemudian perusdalah yang mengolah bahan baku tersebut. Perusda membeli bahan baku tersebut dari khilan. Harga ditentukan melalui rapat dan setelah sepakat maka ditetapkan harganya berjumlah 37500/kg jadi tidak serta merta kelompok khilan yang menentukan harga tersebut karena perusda memiliki hitungan terkait dengan harga pokok produksi yang juga disandingkan nantinya dengan penjualan kompetitor (apa bisa bersaing dengan snack yang lain). Karena terbukti selama dua bulan perjalanan perusda menjual tidak mampu bersaing dengan harga kompetitor, khususnya di harga eceran 1000 dan 500 rupiah.

Fakta dilapangan kompetitor menjual dengan harga 500 sementara perusda tidak mampu menjual 500 per bungkus disebabkan oleh harga pokok produksinya yang mengharuskan untuk dijual dengan harga 1000 rupiah (baru mendapat untung) karena perusda mengalami kerugian jika dijual seharga 500 rupiah dan itulah yang terkadang menjadi salah satu hambatan. Perusda menerima bahan baku sekitar 400kg per hari dari kelompok KHILAN dengan hasil produksi Zaro Snack sekitar 3000 pcs per hari.

Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi bantuan lain berupa peralatan-peralatan yang berkaitan dengan usaha pelaku khilan. Misalnya bekerjasama dengan Perusahaan Daerah, mesin pengolah bahan baku, dan bahan kemasan.

Pada kelurahan binturu jumlah nama peserta program yang tergabung dalam kelompok khilan berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang dan terdiri dari 5 kelompok yang dimana kelompok sasaran dari program ini yaitu para Ibu-ibu dan wanita pengangguran untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota palopo.¹⁴

Fakta dilapangan sesuai hasil wawancara dengan informan menunjukkan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku Khilan khususnya di Kelurahan Binturu berupa pelatihan yang dilakukan di Malindo, dilatih memproduksi beraneka ragam makanan ringan, selain itu Pemkot Palopo melalui Dinas memberikan bantuan berupa peralatan produksi alat *mice mineer* atau penggilingan, untuk mendukung kelancaran produksi UKM tersebut. Disatu sisi, bantuan yang diberikan pemerintah menurut hasil wawancara dilapangan belum sepenuhnya dapat membantu proses produksi, dikarenakan tidak adanya bantuan dana yang diberikan untuk memulai usaha produk khilan, selain itu peralatan produksi yang diberikan tidak merata kesemua kelompok. Hal ini dibuktikan ketika diawal ada beberapa kelompok-kelompok Khilan yang belum berjalan dikarenakan kendala modal dan peralatan yang belum didapatkan.

3. Daya Dukung Politis

Ukuran politis berkaitan dengan didukungannya kebijakan oleh para pembuat keputusan, para pejabat publik, masyarakat, dan lain-lain sumber kekuasaan dalam proses politik.

Pemerintah Kota Palopo membentuk perusahaan daerah sebagai tindak lanjut dari program khilan. Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palopo ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo. Perusda ini didirikan berangkat dari keinginan Wali Kota Palopo, Drs H Muhammad Judas Amir, MH, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palopo Khususnya bagi para pelaku khilan dan meningkatkan daya saing dengan memberikan kemasan yang modern yang mampu bersaing dengan produk lain.

Ditahap pelaksanaan dilakukannya sosialisasi di kantor kelurahan masing-masing kecamatan yang terdaftar dalam Program ini untuk memperkenalkan tentang program Pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota dimana salah satunya adalah Program *Home Industry* Unggulan Khilan.

Adapun tahap seleksi peserta yang tergabung ialah para pendaftar-pendaftar pertama yang dimana mereka bersedia mengikuti Pelatihan yang diadakan di Malindo tepatnya dimasamba selama kurang lebih 10 hari. Di malindo para masyarakat yang terdaftar sebagai peserta diberikan Pelatihan-pelatihan. Dimana mereka banyak dilatih untuk mengolah berbagai macam kerupuk-kerupuk yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan informan, Tahun 2018

bahan dasar pembuatannya mudah ditemukan. Waktu pelaksanaan Program ini dimulai di tahun 2014.

Pemerintah Kota Palopo menggunakan dana APBD untuk memberangkatkan para peserta khilan dalam dua gelombang yang dimana dalam satu gelombang terdiri dari 100 Orang dan dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang, masing masing peserta mendapatkan 3.800.000 / orang selama 10 hari, dengan jumlah peserta khilan sebanyak 200 orang dalam dua gelombang maka jumlah dana yang di keluarkan oleh pemerintah kota palopo dalam dua gelombang sebanyak 760.000.000.

Hasil wawancara dilapangan dengan informan selaku pelaku Khilan di Kelurahan Binturu terkait proses berjalannya program ini menyatakan Perencanaan disusun dengan terstruktur hingga pelaksanaan pelatihan melalui kerja sama pemerintah kota dengan lembaga pelatihan Malindo. Hanya saja pada tahap pelaksanaannya diawal permulaan berjalan sangat baik akan tetapi semakin lama berjalan, program ini terdapat masalah-masalah salah satunya yang sangat berdampak yaitu adanya kemacetan produksi yang panjang yang terjadi selama hampir satu tahun.

Sementara hasil wawancara dengan informan di UPT Industri Pangan mengatakan Semua berjalan sesuai dengan rute atau aturan yang sudah di tetapkan pada tahap perencananaan. Dan di tahap pelaksanaannya cukup berjalan dengan baik hanya saja di tahun ke tiga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi di Perusda sehingga mempengaruhi produksi para kelompok-kelompok Khilan, seperti salah satunya pemasaran Zaro Snack mengalami penurunan sedangkan ketersediaan bahan baku yang sudah dibeli sebelumnya di kelompok Khilan masih banyak, maka dari itu beberapa kelompok Khilan di hentikan sementara untuk berproduksi agar tidak adanya bahan baku yang terbuang sia-sia.¹⁵

Proses berjalannya program khilan dilihat dari daya dukung politis, sudah cukup baik, karena memperoleh dukungan dari berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan masyarakat sendiri. Dan di tahap pelaksanaannya sebenarnya program ini sudah ada kemajuan dari apa yang direncanakan, hanya saja setelah berselang beberapa tahun berjalan ternyata pemasaran snack Zaro mengalami penurunan sehingga mempengaruhi produksi kelompok-kelompok khilan yang begitu lama. Dan juga berpengaruh terhadap kemajuan program ini menurun.

4. Daya Dukung Organisasi

Organizational support atau dukungan sarana maupun prasarana untuk melaksanakan kebijakan merupakan kriteria penting lainnya, karena tidak hanya otoritas dan komitmen dari orang-orang penting saja yang dibutuhkan untuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan informan di UPT Industri, tahun 2018

melaksanakan kebijakan. Sangat penting kiranya untuk memiliki ketersediaan bangunan (*sufficient equipment*), fasilitas fisik serta *support services* lainnya. Jika kondisi ini tidak optimal maka tidak akan kondusif untuk mewujudkan ketercapaian tujuan kebijakan sebagaimana diharapkan.¹⁶

Pengembangan Produk Khilan snack zaro dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Berikut desain kemasan produk khilan berupa zaro snack dan peralatan yang digunakan dalam proses produksinya.



Gambar 1. Desain Produk Zaro Snack



¹⁶ Mulyono Yalia. 2013. evaluasi kebijakan program *mobile* pusat layanan internet kecamatan (mplik). Jurnal Penelitian Komunikasi. Hal:209.

Gambar 2. Peralatan yang digunakan dalam produksi khilan zaro snack

Pengembangan dukungan dalam bidang peralatan dan desain memberikan dampak positif bagi pelaku khilan, hal ini diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pelaku Khilan di Kelurahan Binturu dengan adanya program ini kami memiliki penghasilan tersendiri dan dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga memberikan pengalaman dan pengetahuan terkait cara pembuatan bahan baku snack ataupun kerupuk.¹⁷

Sementara dampak program khilan ini dari segi pemerintah diketahui dengan adanya program ini memberikan dampak nyata kepada masyarakat yang tergabung dalam UKM. Selain meningkatkan kemampuan mereka dalam hal produksi makanan ringan, juga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan dan mengurangi pengangguran dikalangan perempuan.¹⁸

PENUTUP

Evaluasi Kebijakan Program *Home Industry* khilan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di kota palopo. Dimensi pokok dari evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kelayakan teknis, Program ini begitu terstruktur dengan bertujuan untuk meningkatkan SDM dan taraf prekonomian masyarakat dengan pemberian pelatihan di PT. Malindo masamba. Pada tahap pelaksanaan, program ini berjalan satu tahun di bawah naungan KOPERINDAG dan berjalan sangat baik hingga di tahun 2016-2017 KOPERINDAG di pisahkan dan program ini di pegang oleh Dinas Perindustrian dan PERUSDA PALOPO dan disitu mulailah muncul beberapa masalah yang mempengaruhi kelompok khilan di kelurahan binturu. Peluang ekonomi dan finansial, dengan menggunakan dana APBD serta pemberian peralatan penggilingan untuk memulai program di masing-masing kelompok. Program Kebijakan awalnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, namun mengalami penurunan produksi dan tidak lagi mengalami perkembangan. Hal ini dilihat dari 50 orang yang terdiri dari 5 kelompok yang dulunya tergabung di kelompok khilan kini hanya tersisa 3 kelompok saja yang dimana dalam tiap-tiap kelompok yang dulunya beranggotakan 10 orang kini hanya beranggotakan 5-6 orang saja yang masih aktif memproduksi Proses berjalannya program khilan dilihat dari daya dukung politis, sudah cukup baik, karena memperoleh dukungan dari berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan masyarakat sendiri. Dan telah dilakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palopo terkait program industry khilan. Dan daya dukung organisasi, Pengembangan Produk Khilan snack zaro dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan

¹⁷ Hasil wawancara dengan pelaku khilan, Tahun 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan pihak perusahaan daerah, Tahun 2018

Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.

Berbagai macam keputusan dapat diambil atas dasar evaluasi yang dilakukan beberapa diantaranya yaitu meneruskan dan mengakhiri program, memperbaiki praktek dan prosedur administrasi, menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi, melembagakan program ke tempat lain, dan mengalokasikan sumber daya ke program lain. Program *home industry* unggulan khilan ini perlu inovasi baru dalam proses produksinya untuk keberlanjutan program, dengan pola pengembangan yang lebih baik dan evaluasi program serta perbaikan di beberapa bagian baik dari segi proses maupun produksi, misalnya dengan akses pasar yang lebih luas dan dapat memberikatan peningkatan daya beli baik untuk masyarakat kota Palopo ataupun masyarakat luar kota palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Kharisma. 2013. *Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung*. Jurnal Manajemen teori dan terapan. Volume 6, No.3. Hal 95.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan sosial & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Putaka Pelajar.
- Michael, Blanchard, Ken. et. al. 2004. *Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit*. Batam Centre: Interaksara.
- Miles, Mathew. B, A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. . Terjemahan Tjetjep Rohidi: UI-Press.
- James Anderson. 1978. *Public policy making*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Patton, Carl V and Sawicki, David.S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- Prawoto, Nano. 2009. *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Hal: 57
- Sutikno, dkk. 2010. *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 11, Nomor 1. Hal: 135-147
- Yalia, Mulyono Yalia. 2013. *Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)*. Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol.16, No.2. Hal: 205-220.